



## Seleksi Pengisian Jabatan Struktural Kementerian Keuangan Dalam Era Reformasi Birokrasi

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan tahun 2007 melaksanakan perubahan mendasar dalam manajemen sumber daya manusia. Salah satunya adalah pengisian jabatan struktural yang dilakukan melalui mekanisme seleksi untuk memperoleh kandidat yang memiliki integritas, kompetensi, dan kinerja sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Informasi mengenai integritas diperoleh dari hasil pemeriksaan disiplin pegawai oleh Inspektorat Jenderal, analisis transaksi keuangan oleh PPATK, dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Untuk mengukur kompetensi, Kementerian Keuangan menyelenggarakan *Assessment Center* (AC). Hasil AC dapat menginformasikan kesesuaian kompetensi pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan atau yang dikenal dengan istilah *Job Person Match* (JPM). Selain JPM, dipertimbangkan pula riwayat jabatan, pendidikan, kepangkatan, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), dan penugasan lain para kandidat.

Terkait pengukuran kinerja, Kementerian Keuangan menggunakan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* yang dapat mengukur capaian kinerja individu dan organisasi.

Setelah seluruh informasi terkait kandidat diperoleh, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 dilakukan sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk membahas para kandidat yang selanjutnya dimintakan persetujuan Menteri Keuangan.

Dalam proses pemberian persetujuan terkait pengisian jabatan tidak tertutup kemungkinan terjadi dinamika informasi. Menyikapi hal itu, apabila diperlukan, Menteri Keuangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pendalaman informasi antara lain dengan memanggil atau mengundang pihak-pihak tertentu. Dari hasil pendalaman informasi dapat muncul kandidat baru yang akan tetap ditindaklanjuti melalui mekanisme seleksi pengisian jabatan, sebagaimana tersebut di atas.

Dengan demikian, seluruh proses seleksi pengisian jabatan struktural Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, dalam era Reformasi Birokrasi telah dilakukan dengan obyektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. (da)



Kepala Biro

Yudi Pramadi  
NIP 195808111983111001